

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Nalar Tiap Konsep

a. Pengertian Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity)

Menurut Alan C. Shapiro (Shapiro, 1996:820) *“Purchasing power parity is the notion that the ratio between domestic and foreign price level should equal the equilibrium exchange rate between domestic and foreign currencies.”* Shapiro berusaha menjelaskan paritas daya beli merupakan persamaan yang menyatakan bahwa rasio antara tingkat harga domestik dan luar negeri seharusnya sama dengan tingkat ekuilibrium nilai tukar mata uang domestik dan luar negeri.

Pada dasarnya, teori paritas daya beli adalah sebuah cara untuk meramalkan kurs keseimbangan, jika suatu negara mengalami ketidakseimbangan neraca pembayaran. Kurs keseimbangan adalah kurs yang akan menyeimbangkan nilai impor dan ekspor suatu negara (Salvatore, 1996:43). Jadi jika nilai impor lebih besar daripada nilai ekspornya (defisit) maka mata uang negara tersebut akan mengalami depresiasi atau kursnya melemah.

Penurunan nilai mata uang tersebut terhadap mata uang asing, akan membuat harga dari berbagai komoditi ekspornya menjadi lebih murah bagi para importir. Sebaliknya berbagai produk barang atau jasa impor menjadi lebih mahal bagi penduduk dalam negeri. Sehingga ekspor negara tersebut akan mengalami kenaikan sedangkan impornya akan terus menurun. Akhirnya, nilai ekspor dan impor negara-negara tersebut menjadi seimbang atau sama.

Lebih lanjut, teori paritas daya beli mencoba untuk menjelaskan bahwa pergerakan kurs antara mata uang dua negara disebabkan oleh tingkat harga masing-masing negara. Dalam jangka panjang, tingkat harga domestik akan mempengaruhi pembentukan suatu kurs.

Teori paritas daya beli memprediksikan bahwa kenaikan tingkat harga domestik mencerminkan adanya penurunan daya beli mata uang domestik. Penurunan daya beli mata uang tersebut akan diikuti dengan depresiasi mata uangnya. Demikian pula sebaliknya, kenaikan daya beli mata uang domestik mencerminkan terjadinya apresiasi mata uang tersebut secara proporsional dalam pasar valuta asing.

Sebagai contoh, jika tingkat inflasi (penurunan daya beli mata uang domestik) di Amerika sebesar 5 persen dan tingkat inflasi di Jepang sebesar 1 persen, maka menurut teori paritas daya beli, nilai Dolar Amerika seharusnya akan melemah (depresiasi) terhadap Yen Jepang sampai sekitar 4 persen.

Adanya depresiasi ataupun apresiasi mata uang yang proporsional ini menyebabkan terjadinya keseimbangan dalam perdagangan internasional. Jadi, suatu negara tidak akan mengalami kelebihan impor atau ekspor, dengan kata lain, nilai ekspor-impornya seimbang.

Teori paritas daya beli memiliki dua versi yaitu versi absolut dan versi relatif. Teori paritas daya beli absolut mengatakan bahwa kurs ekuilibrium sama dengan rasio tingkat-tingkat harga yang berlaku di kedua negara yang terkait. Sedangkan versi relatifnya menyatakan bahwa perubahan kurs dalam jangka waktu tertentu akan bersifat proporsional atau sebanding besarnya terhadap perubahan tingkat-tingkat harga yang berlaku di kedua negara selama periode

yang sama. Jadi, paritas daya beli relatif mengubah versi absolutnya, dari sebuah pernyataan mengenai tingkatan harga dan kurs menjadi perubahan harga dan perubahan kurs (Salvatore, 1996:126).

b. Pengertian Teori Paritas Daya Beli Absolut

Teori paritas daya beli absolut (*absolute purchasing power parity*), menyatakan bahwa kurs ekuilibrium sama dengan rasio tingkat-tingkat harga yang berlaku di kedua negara. Persamaannya adalah sebagai berikut :

$$R_{ab} = P_a / P_b$$

Dimana,

R_{ab} = kurs antara mata uang negara A dan mata uang negara B

P_a = tingkat harga-harga umum yang berlaku di negara A

P_b = tingkat harga-harga umum yang berlaku di negara B

Teori paritas daya beli versi absolut ini, berdasarkan pada hukum satu harga (*the law of one price*), dimana komoditi yang sama seharusnya memiliki harga yang sama pula di tiap negara. Sehingga daya beli mata uang (*purchasing power of money*) tiap negara adalah sama atau dalam kondisi paritas.

Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki US\$ 1 yang dapat ditukarkan dengan satu kaleng minuman merek tertentu di Amerika Serikat, maka apabila ia membawa uang US\$ 1 tersebut ke Inggris, ia akan dapat memperoleh minuman yang sama dan dalam jumlah yang sama pula. Dalam hal inilah, teori hukum satu harga berlaku.

Sebuah kasus mengenai versi absolut dari teori paritas daya beli yang sering digunakan adalah kasus mengenai harga hamburger Big Mac, yang diteliti

oleh majalah *The Economist*. Kasus tersebut menjelaskan bahwa seandainya kurs yang berlaku sama dengan rasio dari tingkat harga yang berlaku di kedua negara (postulasi versi absolut), maka seharusnya harga sepotong hamburger Big Mac akan sama di semua negara dengan harganya di Amerika Serikat (negara asal Big Mac), apabila dikonversikan dalam Dolar. Namun kenyataannya, harga Dolar dari hamburger Big Mac sangat bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang lain (Lampiran 45).

Kolom pertama dari tabel tersebut, menyajikan harga sepotong Big Mac dalam mata uang lokal di berbagai negara. Kolom kedua menjelaskan harga Big Mac tersebut dalam Dolar di berbagai negara, berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal 30 Maret 1999, yang disajikan pada kolom 4. Misalnya, harga Big Mac di Jerman adalah DM 4.95, sedangkan kurs yang berlaku adalah DM 1.82 per Dolar, maka harga Big Mac tersebut dalam satuan Dolar adalah \$ 2.72 (DM 4.95 dibagi DM 1.82/\$).

Dari data kolom kedua tersebut, dapat dilihat bahwa ternyata harga Big Mac dalam Dolar sangat berbeda antara negara yang satu dengan yang lain. Bila demikian, apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut? Majalah *The Economist* menyebutkan pula bahwa penyebab diferensiasi harga hamburger Big Mac di setiap negara ini adalah karena faktor biaya transportasi dan peraturan pemerintah (misalnya pajak, perijinan dan sebagainya). Selain itu upah para pelayan yang merupakan sektor jasa, sangat berlainan di tiap negara (Salvatore, 1996:129). Sehingga hal tersebut akan menyebabkan perbedaan harga Big Mac di tiap-tiap negara. Jadi jelaslah bahwa faktor transportasi, peraturan pemerintah dan

perbedaan tingkat upah sektor jasa, dapat melemahkan keberlakuan hukum satu harga yang mendasari teori paritas daya beli versi absolut ini.

Kolom ketiga dari tabel tersebut menjelaskan perhitungan paritas daya beli dalam Dolar (*PPP of the Dolar*) yang didapatkan melalui harga Big Mac dalam satuan mata uang lokal dibagi harga Big Mac di Amerika Serikat. Misalnya di Jerman, kurs mata uang Jerman terhadap Dolar menurut konsep paritas daya belinya adalah DM 2.04/\$ (diperoleh melalui DM 4.95 dibagi \$ 2.43). Namun kenyataannya, kurs aktual DM per Dolar nya adalah DM 1.82 per Dolar (kolom 4). Jadi kurs aktual (nilai tukar) dari Jerman terhadap Amerika Serikat yang sesungguhnya, terhitung terlalu tinggi (*over valuation*). Kolom 5 dari tabel ini menunjukkan perbedaan perhitungan nilai tukar suatu mata uang terhadap Dolar, baik yang dihitung terlalu rendah (*under valuation/-*) maupun yang terlalu tinggi (*over valuation/+*).

Sebagai contoh, dalam kasus mata uang Jerman, nilai tukar Mark Jerman terhadap Dolar berdasar kurs aktualnya adalah DM 1.82/\$ sedangkan menurut paritas daya beli, kurs yang seharusnya adalah DM 2.04/\$, berarti nilai tukar Mark Jerman berdasarkan aktualnya terlalu kuat (*over valuation*) bila dibandingkan dengan perhitungannya dalam konsep paritas daya beli, sebesar 12%, yaitu $[(2.04-1.82)/1.82] \times 100\%$. Menurut perhitungan ini, harga-harga yang berlaku di Jerman lebih mahal sekitar 12% daripada harga-harga di Amerika Serikat. Jadi seharusnya, harga-harga yang ada di Jerman lebih murah 12% dari harga yang sekarang berlaku.

Namun teori paritas daya beli absolut ini tidak dapat diandalkan dan tidak begitu tepat. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam versi absolut teori ini, jauh dari realistik. Misalnya :

1. tidak adanya biaya transportasi, tarif atau berbagai kendala lainnya yang menghalangi berlangsungnya arus perdagangan barang dan uang secara bebas,
2. semua komoditi dapat diperdagangkan secara internasional.

Asumsi-asumsi tersebut menyebabkan ada banyak kelemahan-kelemahan dalam teori ini, yaitu :

1. Teori paritas daya beli versi absolut ini tidak dapat menjelaskan peran biaya-biaya transportasi atau berbagai kendala lainnya yang dalam kenyataannya sering menghalangi kelancaran perdagangan internasional (Salvatore, 1996:128).
2. Teori absolut ini tidak dapat menjelaskan secara tuntas peranan kurs dalam menyeimbangkan arus-arus perdagangan dalam barang dan jasa. Hal ini disebabkan oleh beberapa barang dan jasa yang tidak pernah diperdagangkan secara internasional (Salvatore, 1996:128). Misalnya beberapa komoditi yang tidak pernah diperdagangkan antar negara karena biaya transportasinya tidak sebanding dengan nilai barang itu sendiri (jauh lebih tinggi daripada nilai barangnya). Selain itu sebagian besar jasa-jasa tidak pernah diperdagangkan secara internasional, misalnya jasa potong rambut dan sebagainya yang tidak mungkin untuk diperdagangkan secara internasional. Perdagangan internasional cenderung akan menyeimbangkan harga-harga yang dapat diperjualbelikan secara internasional, namun perdagangan internasional tersebut tidak dapat menyeimbangkan harga-harga barang dan jasa yang tidak

dapat diperdagangkan secara internasional. Sedangkan, tingkat harga umum setiap negara akan meliputi semua barang dan jasa, baik yang dapat diperdagangkan secara internasional maupun yang tidak pernah diperdagangkan secara internasional. Maka dari itu, teori ini tidak dapat menjelaskan peranan kurs dalam menyeimbangkan perdagangan.

Melihat kelemahan-kelemahan yang ada di dalam teori paritas daya beli versi absolut ini, maka teori tersebut tidak mungkin dapat diberlakukan. Sehingga kemudian muncul teori paritas daya beli versi relatif yang lebih dapat diberlakukan.

c. Pengertian Teori Paritas Daya Beli Relatif

Karena banyaknya kelemahan-kelemahan yang disebabkan asumsi-asumsi yang tidak realistis dalam versi absolut teori paritas daya beli, maka terbentuklah versi relatifnya. Versi relatif teori paritas daya beli menyatakan perubahan dalam kurs senantiasa proporsional atau sebanding dengan perubahan dalam rasio tingkat-tingkat harga di kedua negara (Salvatore, 1996:128).

Adanya biaya transportasi antar negara yang cukup besar, menyebabkan versi absolut teori ini tidak mungkin dapat digunakan lagi. Biaya-biaya transportasi, pada kenyataannya akan sangat mempengaruhi tingkat harga suatu komoditi. Sehingga hal ini melemahkan hukum satu harga yang merupakan dasar dari teori paritas daya beli. Maka dari itu, selanjutnya muncul versi relatif dari teori ini, yang masih dapat diberlakukan.

Rumusan paritas daya beli versi relatif ini adalah :

$$R_{ab1} = \frac{(P_{a1}/P_{a0})}{(P_{b1}/P_{b0})} \times R_{ab0}$$

Dimana,

R_{ab1} dan 0 = kurs negara A terhadap negara B pada periode 1 dan 0

P_{a1} dan 0 = indeks harga konsumen negara A pada periode 1 dan 0

P_{b1} dan 0 = indeks harga konsumen negara B pada periode 1 dan 0

Berbagai pengujian empiris membuktikan bahwa versi relatif teori paritas daya beli ini, akan dapat memberikan perkiraan yang cukup baik dalam jangka panjang dan dalam berbagai kasus terjadinya gangguan moneter murni, seperti lonjakan inflasi dan sebagainya (Salvatore, 1996:133).

Namun tidak dapat disangkal, banyak penelitian membuktikan bahwa teori paritas daya beli versi relatif terkadang kurang sesuai dengan kenyataannya. Misalnya pada awal tahun 1990, tingkat inflasi di beberapa negara di Eropa, lebih tinggi daripada tingkat inflasi di negara Amerika Serikat. Tetapi, mata uang negara-negara Eropa tersebut tidak mengalami depresiasi terhadap Dolar (Madura, 1997:238).

Jika demikian, apakah yang menyebabkan teori paritas daya beli bertentangan dengan kenyataan empiris yang ada? Ada beberapa kelemahan di dalam teori paritas daya beli ini. Dua hal utama yang menyebabkan teori paritas daya beli ini tidak konsisten adalah (Madura, 1997:238):

1. Adanya faktor-faktor lain sebagai pembentuk kurs

Seperti diketahui bahwa suatu kurs terbentuk oleh bermacam-macam faktor.

Misalnya suku bunga, intervensi/kontrol pemerintah dan sebagainya. Sebagai contoh, seandainya tingkat inflasi di Perancis 5% lebih tinggi daripada di

Amerika Serikat, maka seharusnya mata uang Perancis akan mengalami depresiasi kurang lebih 5 % terhadap Dolar. Namun, apabila pemerintah Perancis membuat kebijakan untuk menghambat ekspor Amerika Serikat ke negaranya, maka kursnya tidak akan tersesuaikan. Selain itu, tingkat suku bunga suatu negara juga akan mempengaruhi terbentuknya suatu kurs. Misalnya, sekitar tahun 1990, negara Hongkong, Singapore dan Korea Selatan, mengalami tingkat inflasi yang tinggi. Tapi pada kenyataannya, mata uang negara-negara tersebut tidak terdepresiasi terhadap Dolar. Hal ini disebabkan karena tingkat suku bunga yang tinggi di negara-negara tersebut. Akibatnya justru banyak investor-investor perusahaan di Amerika Serikat, yang menanamkan modalnya di negara-negara tersebut.

2. Tidak adanya barang pengganti (*substitute goods*)

Apabila suatu negara, misalnya Perancis mengalami kenaikan tingkat inflasi lebih tinggi sekitar 5 % daripada di Amerika Serikat. Berdasarkan konsep paritas daya beli, seharusnya mata uang di Perancis akan terdepresiasi sekitar 5 % pula. Namun, hal itu bisa saja tidak terpenuhi apabila ternyata di negara Amerika Serikat tidak terdapat komoditi yang dibutuhkan penduduk domestiknya, barang tersebut hanya terdapat di Perancis. Oleh karena itu, penduduk Amerika Serikat akan tetap melanjutkan untuk membeli komoditi di Perancis walaupun harganya terasa mahal (karena tingkat inflasi yang lebih tinggi). Dalam hal inilah, maka konsep paritas daya beli tidak konsisten.

Secara umum, menurut Salvatore (Salvatore, 1996:137-139), ada beberapa hal yang dapat melemahkan konsep paritas daya beli, khususnya konsep paritas daya beli versi relatif, yaitu: pertama, asumsi hukum satu harga yang tidak

memperhitungkan adanya biaya-biaya transportasi dan hambatan perdagangan seperti tarif dan sebagainya. Padahal seperti diketahui, biaya-biaya transportasi, dalam kenyataannya sangat mempengaruhi tingkat harga di berbagai negara. Sehingga sangat melemahkan hukum satu harga yang melandasi teori ini.

Kedua, adanya pasar monopolistik dan oligopolistik akan semakin melemahkan hukum satu harga ini. Apalagi bila hal tersebut diikuti besarnya biaya transportasi dan hambatan perdagangan. Karena dengan adanya pasar tidak sempurna tersebut, harga-harga barang menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Demikian pula bila ditambah dengan adanya biaya transportasi ataupun tarif untuk barang tersebut. Jadi kesimpulannya, pasar tidak sempurna dan biaya transportasi serta hambatan perdagangan akan semakin memperlemah keterkaitan antara kurs dan tingkat harga yang dianut oleh hukum satu harga.

Ketiga, adanya barang dan jasa yang tidak dapat diperdagangkan secara internasional yang mempengaruhi pembentukan indeks harga umum tiap-tiap negara, akan semakin melemahkan teori ini. Bahkan juga untuk versi relatifnya. Seperti diketahui, bahwa indeks harga umum, selalu mencakup segenap barang atau jasa, baik yang dapat diperdagangkan maupun yang tidak dapat diperdagangkan secara internasional. Sehingga perbedaan tingkat harga dan jenis barang dan jasa yang tidak dapat diperdagangkan secara internasional ini, pasti akan mempengaruhi tingkat harga umum secara keseluruhan. Apabila tingkat harga untuk barang yang tidak dapat diperdagangkan secara internasional itu meningkat, maka indeks harga umum secara keseluruhan juga akan meningkat. Sehingga, daya beli mata uang suatu negara akan mengalami depresiasi apabila

tingkat harga dari barang-barang dan jasa yang tidak diperdagangkan secara internasional meningkat

Keempat, jenis komoditi acuan yang digunakan tiap-tiap negara untuk menghitung tingkat inflasinya berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena preferensi akan konsumsi masing-masing negara berbeda-beda. Sebagai contoh, kalangan konsumen di Indonesia lebih banyak mengkonsumsi beras, bangsa Perancis paling banyak mengkonsumsi *croissant*, sedangkan bangsa Jepang mengkonsumsi ikan, dan sebagainya. Apabila harga beras di Indonesia meningkat maka hal tersebut akan menyebabkan tingkat harga umum di Indonesia meningkat pula. Namun, kenaikan tersebut belum tentu dialami oleh negara lain yang tidak menjadikan beras sebagai komoditi acuannya.

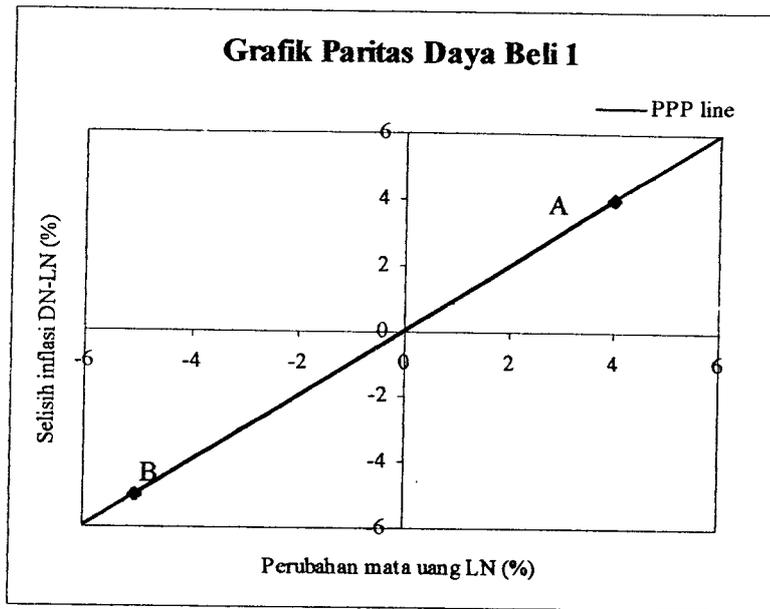
d. Analisa Grafik Konsep Paritas Daya Beli

Melalui konsep paritas daya beli, akan dapat diketahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh perubahan tingkat inflasi terhadap perubahan suatu kurs (Madura, 1997:233). Berdasarkan konsep ini, maka perubahan tingkat inflasi akan sesuai atau sama besarnya dengan perubahan kurs diantara dua negara.

Penjelasan lebih lanjut, akan digambarkan dalam grafik dibawah ini :

Titik A, pada Gambar 1, menunjukkan suatu contoh apabila tingkat inflasi dalam negeri lebih tinggi daripada inflasi luar negeri. Misalnya saja, negara Amerika Serikat sebagai negara domestik memiliki tingkat inflasi sebesar 9 %, sedangkan Inggris sebagai negara asing memiliki tingkat inflasi sebesar 5%. Maka dapat diketahui bahwa selisih inflasi kedua negara adalah 4% (Inflasi DN-LN). Akibat dari lebih tingginya tingkat inflasi dalam negeri ini, akan menyebabkan

Gambar 1



Sumber: Jeff Madura, *International Financial Management*, edisi kelima, hal. 234, 1997.

mata uang luar negeri (Inggris) mengalami apresiasi sebesar 4% (seperti digambarkan pada titik A).

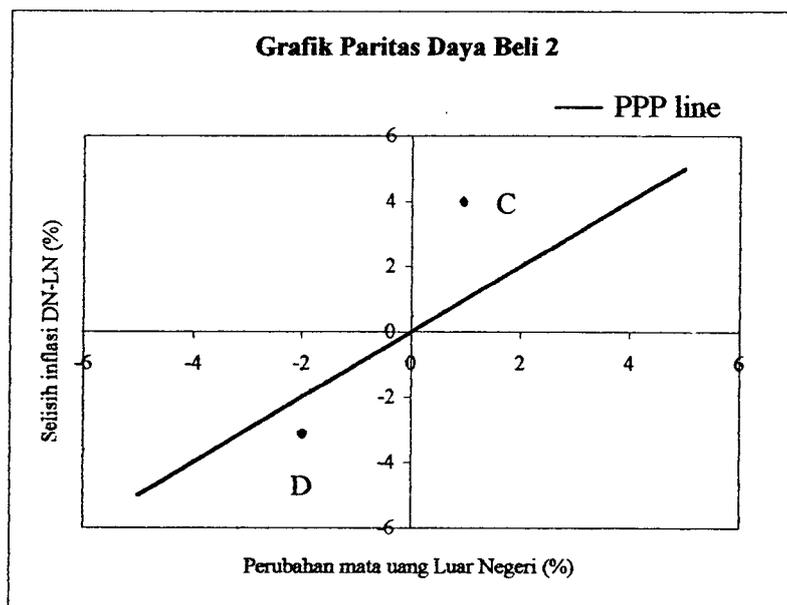
Titik B menggambarkan tingkat inflasi di luar negeri lebih tinggi daripada di dalam negeri. Misalnya saja tingkat inflasi dalam negeri adalah 1%, sedangkan tingkat inflasi luar negeri adalah 6%. Maka perbedaan tingkat inflasi kedua negara adalah 5% (pada grafik, inflasi DN-LN = -5%). Oleh karenanya, mata uang luar negeri akan terdepresiasi sebesar 5%.

Jadi, apabila perubahan tingkat inflasi diikuti oleh perubahan kurs suatu mata uang yang sama besarnya, maka teori paritas daya beli ini berlaku. Sehingga titik-titik tersebut akan tepat berada atau mendekati garis paritas daya beli.

Gambar selanjutnya (Gambar 2) menggambarkan perbedaan daya beli di dua negara. Apabila perubahan kurs tidak bergerak sesuai dengan konsep paritas daya beli (sesuai tingkat inflasinya), maka akan terdapat perbedaan dalam daya beli mata uang kedua negara tersebut.

Titik C pada Gambar 2, menggambarkan tingkat inflasi dalam negeri lebih besar daripada di luar negeri sebesar 4 %. Namun perubahan kurs ternyata tidak sesuai dengan perubahan tingkat inflasinya. Titik C menunjukkan bahwa ternyata penurunan nilai tukar mata uang dalam negeri hanya sebesar 1 % (apresiasi luar negeri 1 %). Hal ini akan menyebabkan konsumen dalam negeri terus menerus

Gambar 2



Sumber: Jeff Madura, *International Financial Management*, edisi kelima, hal. 234, 1997.

mengimpor barang-barang luar negeri karena harganya terasa murah (daya beli mata uang dalam negeri di negara asing lebih tinggi daripada di negara domestik). Jadi, pembelian barang-barang produk luar negeri akan semakin meningkat. Dalam hal ini, teori paritas daya beli menjelaskan bahwa perubahan nilai mata uang yang tidak sesuai dengan tingkat inflasinya (*disparity in purchasing power*), dapat terjadi dalam jangka pendek.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka tingkat permintaan yang tinggi akan produk-produk luar negeri ini, akan meningkatkan pula nilai mata uang luar negeri tersebut (apresiasinya semakin besar). Hingga pada akhirnya perubahan

nilai mata uang tersebut akan sesuai dengan perbedaan inflasi kedua negara. Dalam Gambar 2, hal tersebut ditunjukkan dengan semakin mendekatnya titik C ke arah garis paritas daya beli. Jadi, semua titik yang berada di kiri atas garis paritas daya beli akan menunjukkan pembelian barang-barang di luar negeri yang lebih menguntungkan daripada membelinya di dalam negeri.

Sebaliknya titik D menunjukkan tingkat inflasi luar negeri yang lebih besar dari pada di dalam negeri, yaitu sebesar 3% (dalam grafik, inflasi $DN-LN = -3\%$). Menurut teori paritas daya beli, seharusnya mata uang luar negeri tersebut akan didepresiasi sebesar 3 % pula. Namun kenyataannya, nilai mata uang luar negeri hanya terdepresiasi sebesar 2% saja. Sehingga, bagi penduduk domestik, akan lebih menguntungkan bila membeli barang-barang di dalam negeri daripada membeli barang-barang di luar negeri. Terlalu kuatnya nilai mata uang luar negeri tersebut, menyebabkan penduduk dalam negeri tidak melanjutkan impornya dari negara asing tersebut. Sehingga permintaan yang rendah akan produk-produk luar negeri ini, akan melemahkan mata uang di luar negeri tersebut.

Perubahan tersebut akan ditunjukkan dengan semakin mendekatnya titik D ke garis paritas daya beli. Jadi semua titik yang berada di sebelah kanan bawah garis paritas daya beli mengindikasikan lebih menguntungkan bila membeli barang di dalam negeri daripada membelinya di luar negeri. Perbedaan yang cukup signifikan dari titik tersebut terhadap garis paritas daya beli, menunjukkan bahwa persentase perubahan kurs mata uang asing tidak hanya disebabkan oleh faktor inflasi, seperti dalam konsep paritas daya beli.

